

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. 2002. *Reformasi Hukum Tanah yang Berpihak Kepada Rakyat*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2004. *Masalah Kerangka persoalan dan pokok-pokok kebijakan pertanahan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

_____. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Bushar Muhammad 2006. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Kedua.

C. S. T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Effendi Perangin. 1990. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: Rajawali Cetakan Kedua.

John Salondeho. 1998. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Cetakan Kedua Sinar Grafika.

Maria S.W Sumardjono. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong 2004 *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia

R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman 2003 *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT.Rineka Citra

Soedaryo Solmin. 1993. *Status Hak dan Pengadaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, M.A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Wilayah Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

C. SITUS WEBSITE

http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/e_bangunan_kantor_pemerintah_2015.pdf

http://moslemwiki.com/Kabupaten_Kerinci

<http://kerincikab.go.id/potensi>

<http://kerincitime.co.id/inilah-cerita-terbentuknya-bukit-tengah.html>

<http://jambi.tribunnews.com/2016/01/04/waduh-ternyata-kantor-bupati-kerinci-belum-bersertifikat>

